

DETERMINAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh

Intan Yulita Nugroho¹, Ismunawan²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

E-mail: ¹intanyulita25@gmail.com, ²wanismu@ymail.com

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari sumber-sumber penerimaan daerah bagi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sumber penerimaan daerah yang digunakan pada penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Jenis penelitian menerapkan bentuk penelitian kuantitatif dengan mengaplikasikan data sekunder sebanyak 5 tahun yaitu tahun 2016 – 2020. Metode penarikan sampel memakai pendekatan *non-probability* dengan menerapkan teknik sampling jenuh. Data penunjang didapatkan melalui berbagai sumber yaitu kajian pustaka buku, website pemerintahan, dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ditemukan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Modal. Sedangkan untuk sumber penerimaan daerah yang merupakan bentuk transfer dana dari pusat yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh bagi Belanja Modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana diartikan dalam terciptanya suatu perubahan pelaksanaan sistem pemerintahan yang pada mulanya sentralisasi menjadi desentralisasi menciptakan berbagai harapan yang baru bagi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah sebaiknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana bentuk dari kriteria pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat mencerminkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Zais, 2017)

Kebijakan otonomi daerah dapat mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Otonomi daerah juga dapat membantu pemerintah daerah untuk mempermudah dalam menampung berbagai aspirasi dari masyarakat, sehingga terwujud kebijakan-kebijakan yang relevan dengan

kondisi serta kebutuhan masyarakat pada suatu daerah. (Priambudi, 2017)

Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan aset milik sendiri menjadi suatu pertanda yang bagus dalam perannya sebagai daerah otonom. Sebab, adanya desentralisasi membentuk harapan yang tinggi bagi pemerintah daerah agar bisa mandiri dalam mendanai berbagai keperluannya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam kemandirian pengelolaan daerah juga diwujudkan dalam kepemilikan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu berbeda-beda pada setiap daerah, sebab kebutuhan dan kondisi masyarakat juga tidak sama. Selain dituntut untuk mampu menciptakan kemandirian fiskal, pemda juga menerima suntikan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat atau APBN. Dimana dana

tersebut nantinya difungsikan guna dikelola dan dialokasikan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dari masing-masing daerah.

Pemerintah daerah menggunakan APBD untuk pedoman dalam merencanakan pelaksanaan keuangan daerah. APBD merepresentasikan rencana kerja tahunan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan yang telah diatur dan direncanakan dengan perhitungan keuangan. Pemerintah daerah selayaknya menyusun laporan keuangan guna memberi gambaran terkait dengan kinerja pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk menyusun rencana keuangan periode berikutnya. Laporan keuangan yang mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai tolak ukur dari segi finansial, Laporan Realisasi Anggaran dinilai dapat menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. (Fatimah, 2019)

Belanja Daerah menjadi bagian dari komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran yang mampu difungsikan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah. Belanja daerah menggambarkan pengeluaran-pengeluaran apa saja yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan daerahnya. Belanja modal bisa dikatakan sebagai bentuk belanja yang bersifat produktif, dimana didalamnya mengindikasikan pengeluaran-pengeluaran jangka panjang yang mencerminkan bentuk investasi. Alokasi belanja daerah dilakukan menurut kebutuhan dan kondisi dari masing-masing daerah otonom.

Tingginya jumlah Belanja Modal menjadi cerminan bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal untuk menyediakan fasilitas publik yang semakin memadai. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat menstimulus laju perekonomian daerah dengan

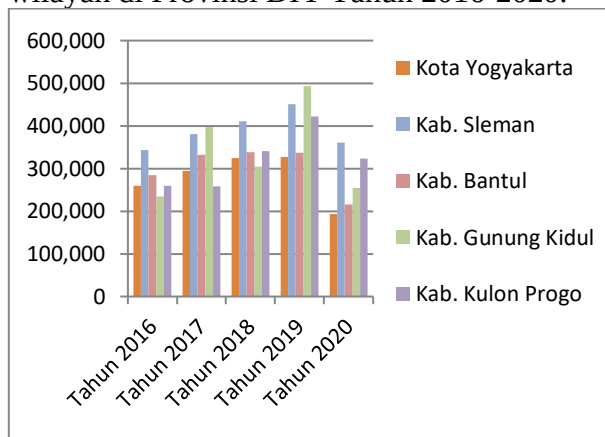
adanya aktivitas ekonomi yang nantinya juga akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan daerah. (Pratiwi, 2019)

Belanja Modal sebagai cerminan dari upaya pembangunan dan kegiatan investasi menjadi pos belanja daerah yang memiliki masa manfaat jangka panjang. Tujuan dari realisasi Belanja Modal berhubungan tentang penyediaan pelayanan publik, sebab jika dilihat dari jenis aset yang sering dituangkan pada laporan pemerintah menunjukkan bahwa jenis belanja ini dimaksudkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang semakin baik untuk masyarakat. (Lubis, 2015)

Namun, adanya Belanja Modal tidak semuanya berkaitan secara langsung dengan upaya penyediaan pelayanan publik. Sebagai contoh yaitu bangunan yang digunakan secara penuh oleh aparatur atau satuan kerja merupakan hasil output dari proyek fisik yang tidak terdapat keterkaitan secara langsung kepada fungsi pelayanan publik. Pembentukan Belanja Modal berprinsip pada upaya untuk mendapatkan aset tetap kepunyaan pemda, serta tetap memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi pemerintah daerah maupun masyarakat. Sehingga kontribusi masyarakat sangatlah diperlukan agar dapat menyumbang usulan penting dalam menentukan aset tetap mana yang akan didapatkan melalui pelaksanaan Belanja Modal. (Putri, 2018)

Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi pemerintah daerah DIY menjadikan pos Belanja Modal memiliki perhatian khusus. Mengingat bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang banyak dikenal dengan pariwisatanya. Sehingga pembangunan khususnya dalam sektor wisata menjadi suatu bentuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Namun, pada tahun 2020 terjadi musibah kesehatan yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai macam sektor. Himbauan pemerintah untuk melakukan *social distancing*

serta penerapan kebijakan PSBB untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus Covid-19 menyebabkan kegiatan masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pemerintah daerah mengalami penurunan yang cukup drastis. Lesunya perekonomian menyebabkan tidak tercapainya realisasi APBD yang sebelumnya sudah ditetapkan. Sehingga secara otomatis akan mempengaruhi bentuk dari APBD, dimana alokasi pos-pos untuk belanja daerah seperti Belanja Modal juga mengalami perombakan. Berikut adalah grafik Belanja Modal pada wilayah di Provinsi DIY Tahun 2016-2020:



Gambar 1. Belanja Modal Provinsi DIY tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

Gambar 1 mengungkapkan situasi dimana Belanja Modal yang terealisasi pada 2016 – 2019 selalu memperlihatkan sebuah peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur serta investasi yang dijalankan selalu terjadi perkembangan yang cukup baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan Belanja Modal diseluruh wilayah dalam Provinsi DIY yang cukup signifikan.

Hasil penelitian Dewi (2019) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai dampak secara positif bagi Belanja Modal. Kemudian penelitian Meltia dkk. (2021) menerangkan hasil bila Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai dampak bagi Belanja Modal. Dimana keputusan dari penelitian tersebut berbanding terbalik dengan kesimpulan dari

penelitian Suryani dan Pariani (2018) yang menjelaskan bahwa tidak ditemukan adanya dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Belanja Modal. Selanjutnya, penelitian Putri dkk. (2021) mengungkapkan hasil dimana Dana Alokasi Umum (DAU) tak ditemukan adanya dampak bagi Belanja Modal. Hasil penelitian Huda dan Sumiati (2019) menyatakan bahwa tidak adanya dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Belanja Modal. Kemudian, penelitian Rahman (2018) menyatakan hasil bahwa tidak terdapat adanya dampak Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Belanja Modal.

Menurut penelitian sebelumnya sudah banyak diselenggarakan, ternyata masih menunjukkan hasil yang tidak sama. Terdapat penelitian yang mengungkapkan hasil berpengaruh, dan terdapat pula penelitian yang menyatakan sebaliknya, yaitu tidak berpengaruh. Hal tersebut membuat peneliti ingin mengangkat kembali penelitian tentang pengaruh dari keempat sumber penerimaan daerah tersebut bagi Belanja Modal, khususnya pada daerah-daerah yang terdapat dalam Provinsi DIY, terlebih setelah adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perombakan rencana keuangan pemerintah daerah dan menurunnya realisasi Belanja Modal yang berakibat pada tidak tercapainya realisasi Belanja Modal pada tahun 2020. Hal tersebut nantinya diharapkan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemda setempat, dalam upaya menambah realisasi Belanja Modal yang salah satunya dilakukan melalui faktor keuangan.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian penyusun dari APBD, sehingga dapat menunjukkan kemampuan daerah saat mengelola dan menggali sumber serta potensi daerahnya sendiri. (Wulandari dan Iryanie, 2018:23) Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah guna

mendorong terwujudnya upaya desentralisasi yang luas, jelas, dan kredibel. (Huda dan Sumiati, 2019) Sebagai penerimaan yang bisa dikatakan cukup fleksibel dalam pengupayaannya, Pendapatan Asli Daerah dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menstimulus terciptanya keberhasilan pembangunan daerah. Ada banyak cara yang bisa dilaksanakan dalam usaha untuk peningkatan PAD agar hampir sama ataupun mungkin setara seperti penerimaan potensinya, tetapi secara luas terdapat 2 teknik yang bisa digunakan dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Komponen pembentuk PAD menjadi bagian dari sumber pembiayaan yang ditujukan kepada pembangunan. Besarnya nilai manfaat ataupun alokasinya, disesuaikan menurut berbagai macam faktor yang terdapat pada masing-masing daerah baik secara internal maupun eksternal. (Firdausy, 2017)

Dana Bagi Hasil

Menurut Siregar (2015:144) yang mendefinisikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai hak daerah sebagaimana bentuk dari upaya dalam mengelola sumber penerimaan atau pendapatan negara yang didapatkan melalui masing-masing daerah. Penentuan besaran daerah penghasil dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Melalui sudut pandang secara teori, Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai penerimaan atau pendapatan daerah yang jika dilakukan pengalokasian ke dalam pos anggaran Belanja Modal, akan dapat memiliki potensi yang baik. Sebagai bagian dari penyusun Dana Perimbangan, DBH tersusun dalam pajak dan non pajak (sumber daya alam). Tujuannya antara lain memulihkan keseimbangan secara vertikal (pusat dan daerah) melalui cara pengamatan potensi daerah penghasil. Proses dibagikannya DBH dilaksanakan melalui dasar prinsip “*by origin*” atau pada daerah asal, dimana daerah penghasil harus ikut merasakan manfaat dari sebagian penerimaan yang telah

didapatkan oleh daerah tersebut. (Widjaja, 2009:46) Dana Bagi Hasil menjadi bagian dari pendapatan transfer yang didapatkan pemerintah daerah dimana dana tersebut dapat dianggarkan ke dalam pos dana untuk pembangunan. (Sukarno dkk., 2019)

Dana Alokasi Umum

Menurut Wulandari dan Iryanie (2018:11) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum diartikan sebagai pengalokasian dana yang dilakukan secara tahunan untuk diberikan kepada daerah otonom yang nantinya dapat difungsikan sebagai dana pembangunan. Penetapan besarnya proporsi DAU yang diberikan, dilakukan menurut imbalan kewenangan antar daerah. Berdasarkan keterangan Halim (2016:127) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai sifat “*Block Grant*” dimana pemerintah daerah bebas dan leluasa menggunakan dana tersebut yang kemudian dialokasikan berdasarkan situasi dan kondisi dari setiap daerah untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana dan pelayanan publik sebagaimana wujud dari pelaksanaan desentralisasi. Kondisi dan kebutuhan setiap daerah yang berbeda-beda mengakibatkan jumlah Dana Alokasi Umum yang diberikan juga tidak sama besarnya. Daerah yang kurang mampu dalam mendanai pengeluarannya sendiri, maka akan menampung kucuran Dana Alokasi Umum yang besar, begitu pun sebaliknya jika suatu daerah dinilai mampu dalam mendanai pengeluarannya secara mandiri, maka daerah yang bersangkutan juga akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. (Sumangkut dkk., 2019)

Dana Alokasi Khusus

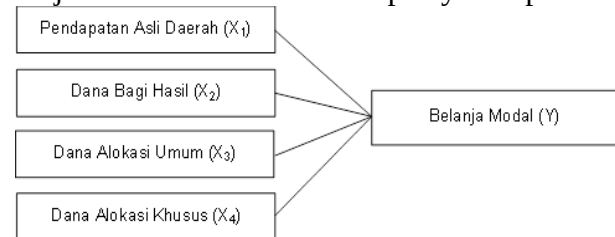
Menurut Sudaryo (2017), yang memaparkan mengenai Dana Alokasi Khusus termasuk dalam dana transfer yang memiliki sifat spesifik, dimana digunakan untuk tujuan tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam Patarai (2016), yang menerangkan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus difungsikan dalam pembiayaan investasi

pengadaan ataupun untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik dimana cara ekonomis memiliki jangka waktu yang panjang. Pada situasi tertentu, DAK juga bisa digunakan dalam membantu pengeluaran untuk operasional dan pemeliharaan sarana prasarana khusus untuk waktu tidak lebih dari 3 tahun. DAK diperoleh melalui APBN untuk ditujukan bagi daerah tertentu, sebagai maksud guna melakukan pendanaan suatu kegiatan spesifik yang menjadi keperluan daerah serta sebagai prioritas nasional. Pengalokasian DAK dilakukan mengacu atas pendapat daerah yang terdiri dari pendapat mengenai kegiatan dan sumber pembiayaan untuk dilakukan pengajuan ke Menteri Teknis. Penyaluran Dana Alokasi Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Belanja Modal

Dalam Halim (2016:73) yang mengartikan Belanja Modal sebagai penggunaan anggaran yang dilakukan sebagai upaya untuk membentuk modal yang terwujud dalam penambahan kuantitas ataupun kualitas aset tetap yang mampu menghasilkan manfaat dalam jangka waktu diatas 1 (satu) periode akuntansi. Menurut Wulandari dan Iryanie (2018:18) yang mengindikasikan bahwa penggunaan Belanja Modal dilakukan sehubungan dengan kegiatan pembelian ataupun pengadaan maupun pembangunan aset tetap dengan nilai manfaat yang dimiliki melebihi 12 bulan yang nantinya akan difungsikan untuk menunjang kegiatan dalam pemerintahan. Jumlah penganggaran Belanja Modal untuk menentukan besarnya nilai pembelian atau pembangunan aset hanya sebesar harga pada saat pembelian atau pembangunan aset. Pengeluaran anggaran untuk Belanja Modal di daerah satu tidak sama besar dengan daerah lainnya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kebutuhan lokal suatu daerah. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan sarana prasarana, baik dalam hal untuk

mendukung tugas-tugas pemerintahan ataupun wujud fisik dari fasilitas dan pelayanan publik.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah bagi Belanja Modal

Penerimaan atau pendapatan daerah yang didapatkan karena upaya pengelolaan sumber dayanya sendiri menjadi bagian dari sumber penerimaan yang bisa dimanfaatkan dengan bebas ataupun leluasa. Besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah, bisa diartikan bahwa pelayanan dan fasilitas publik yang disediakan juga akan semakin memadai. Besarnya Pendapatan Asli Daerah juga dapat difungsikan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kemandirian fiskal pemerintah daerah. Kemandirian daerah dalam membayar kebutuhan daerahnya sendiri dicerminkan melalui Pendapatan Asli Daerah yang besar. Hal tersebut menciptakan besarnya kesempatan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, khususnya pembangunan jangka panjang sebagai bagian dari investasi yang dilakukan. Sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui fasilitas publik yang semakin baik dan memadai. Penelitian soal korelasi Pendapatan Asli Daerah kepada Belanja Modal pernah diselenggarakan Aditiya dan Dirgantari (2017) dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bila Pendapatan Asli Daerah berdampak dengan signifikan bagi Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil bagi Belanja Modal

Besarnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikantongi oleh pemda merupakan kesempatan baik yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Penggunaan Dana Bagi Hasil sebaiknya dilakukan dengan bijaksana, efektif,

dan efisien. Dana Bagi Hasil menjadi dana transfer dari pemerintah pusat yang dapat dialokasikan dalam pos dana pembangunan sebagaimana tercermin dalam Belanja Modal. Pengalokasian tersebut diharapkan dilakukan dengan cermat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap daerah. Pembangunan yang terlaksana dengan cermat akan menghasilkan efek yang bagus kepada perekonomian. Sehingga apabila Dana Bagi Hasil semakin besar, maka akan berdampak pula terhadap peningkatan jumlah Belanja Modal. Penelitian tentang bagaimana kaitan perihal Dana Bagi Hasil kepada Belanja Modal telah terlebih dahulu dilaksanakan Sudrajat dan Purniawati (2017) dimana penelitiannya mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh signifikan Dana Bagi Hasil kepada Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum bagi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) dapat digunakan dalam pembiayaan berbagai pengeluaran daerah, salah satunya pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi penting, disebabkan karena belum meratanya pembangunan di setiap daerah. Daerah yang mempunyai sumber daya tinggi akan terlihat lebih berkembang daripada daerah yang mempunyai hanya sedikit sumber daya. Maka dari itu, pembentukan Dana Alokasi Umum dilakukan dengan tujuan guna meminimalisir terjadinya kesenjangan fiskal daerah satu dengan daerah lainnya. Keberadaan Dana Alokasi Umum diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam bidang perekonomian karena semakin meratanya kesejahteraan masyarakat. Penelitian tentang keterkaitan perihal Dana Alokasi Umum kepada Belanja Modal telah terlebih dahulu dilaksanakan Dewi (2019) dimana penelitiannya menyatakan bila Dana Alokasi Umum bagi Belanja Modal ditemukan suatu pengaruh secara signifikan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus bagi Belanja Modal

Sebagai anggaran yang dimaksudkan guna membantu dalam hal kegiatan khusus suatu daerah yang menjadi prioritas nasional, sehingga tujuan dari pembentukannya yaitu mengurangi beban pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk membantu dalam pembiayaan apabila dalam pembangunan terdapat masalah kekurangan dana. Penelitian tentang bagaimana kaitan pada Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal telah lebih dulu dilaksanakan oleh Murti dan Trisnawati (2021) dimana penelitiannya memaparkan hasil yaitu ditemukannya dampak Dana Alokasi Khusus kepada Belanja Modal. Sehingga diartikan bahwa semakin banyak nominal dari DAK yang dikucurkan, maka semakin dapat mendorong peningkatan Belanja Modal di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan bagi Belanja Modal

H₂: Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan bagi Belanja Modal

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan bagi Belanja Modal

H₄: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan bagi Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, mengambil informasi yang diolah berwujud data sekunder. Menurut Darma dkk. (2019:12), data sekunder diindikasikan sebagai data yang pengumpulannya dilaksanakan bukan secara langsung atau perolehan data dengan kondisi data tersebut telah siap digunakan yang usaha pengumpulannya dilakukan oleh kelompok lain. Data penelitian berbentuk Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan APBD seluruh Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2020. Metode pengumpulan data menerapkan teknik dokumentasi dengan mengunduh data milik Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPk) dengan menelusuri website www.djpk.kemenkeu.go.id dan memakai kajian pustaka buku serta penelitian-penelitian sebelumnya yang pelaksanaannya dilakukan terlebih dahulu.

Populasi pada penelitian memakai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan APBD Kabupaten atau Kota yang terdapat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2020. Dari Sujarweni (2014:65) menerangkan bahwa populasi adalah semua hal baik itu obyek ataupun subyek yang berkarakter dan berkualitas khusus sebagaimana sudah didelegasikan peneliti guna dilakukan penelitian dan melakukan penarikan kesimpulan. Melalui Sujarweni (2014:65), sampel yaitu suatu elemen dari sekumpulan kriteria milik populasi yang dimasukkan dalam penelitian. Metode penarikan sampel menggunakan pendekatan *non-probability* dengan teknik sampling jenuh. Melalui Sugiyono (2018:85) yang memaparkan bahwa sampling jenuh yaitu cara penarikan sampel yang menjadikan seluruh bagian dari populasi sebagai sampel. Adapun nama lain dari sampling jenuh yaitu sensus. Berdasarkan uraian tersebut, maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 25 data (5 Kabupaten/Kota x 5 tahun).

Teknik Analisis Data

Uji Normalitas

Dalam Ghozali (2018:161) yang menjelaskan bahwa pengujian ini dilaksanakan dengan maksud guna mengetahui variabel pengganggu maupun residual apakah terdapat distribusi secara normal atau tidak normal. Dalam Gunawan (2018) yang memaparkan mengenai kriteria pengambilan keputusan pada pengujian ini melalui metode uji Kolmogorov-Smirnov dengan mengacu pada ketentuan kalau signifikansinya $>0,05$, sehingga data dinyatakan tersebar dengan normal, namun

kalau nilai signifikansinya $<0,05$, bisa diperlihatkan bahwa data memiliki distribusi dengan tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Melalui Ghozali (2018:107) yang menerangkan bahwa uji multikolinearitas difungsikan guna mendeteksi masalah korelasi antar variabel *independent* yang kemungkinan dapat timbul pada suatu model regresi. Untuk memperlihatkan apakah pada model regresi mengalami masalah multikolinearitas atau bukan, bisa diperhatikan lewat angka *Variance Inflation Factor* (VIF) serta *Tolerance*. Jika diperlihatkan model regresi yang menyatakan angka VIF <10 serta angka tolerance-nya $>0,1$, maka bisa disebut terhindar dari multikolinearitas. Sedangkan kalau angka VIF >10 serta nilai tolerance-nya $<0,1$, maka boleh dibilang dengan suatu regresi mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilaksanakan dengan maksud guna mengetahui apa benar pada suatu penelitian ke penelitian lain mengalami perbedaan varians. Dikatakan homoskedastisitas apabila varians pada residual suatu penelitian ke penelitian lainnya adalah tetap, namun apabila mengalami ketidaksamaan disebut heteroskedastisitas. Uji *Glejser* bisa diterapkan guna mendapatkan kebenaran pada suatu model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak, yaitu dengan melakukan pengregresian nilai absolut residual kepada variabel *independent*. (Ghozali, 2018:137) Diperoleh bentuk kalau angka signifikansinya $>0,05$, yang mana bisa dipahami tidak mengalami heteroskedastisitas. Kemudian daripada itu, kalau angka signifikansinya $<0,05$, diindikasikan dengan data mengalami heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018:142)

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) yang mengatakan bahwa pengujian ini merupakan uji yang dilaksanakan guna melihat kesalahan

pengganggu di antara masa t dengan masa $t-1$ (sebelumnya) yang mungkin dialami oleh model regresi. Sebab terjadinya autokorelasi dikarenakan observasi dilakukan secara urut selama waktu yang ditentukan sehingga kemungkinan dapat timbul hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pengujian autokorelasi dapat dilaksanakan dengan menerapkan metode *Durbin Watson* (DW). Dalam Ghazali (2018:112) memuat dasar untuk mengungkapkan ada atau tidaknya masalah autokorelasi, dimana dinyatakan tidak terdapat autokorelasi *positive* apabila diperoleh perbandingan $0 < d < dl$ ataupun perbandingan $dl \leq d \leq du$, dan tidak ditemukan autokorelasi yang *negative* apabila diperoleh perbandingan $4-dl < d < 4$ ataupun perbandingan $4-du \leq d \leq 4-dl$, serta tidak ditemukan adanya autokorelasi baik *positive* ataupun *negative* apabila diperoleh perbandingan $du < d < 4-du$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian ini dilaksanakan dengan maksud menunjukkan tujuan hubungan serta mengetahui dampak variabel *independent* bagi variabel *dependent*. (Ghazali, 2018) Pengujian ini diterapkan pada penelitian yang mempunyai variabel *independent* diatas 1 (satu). Penelitian ini menyatakan model persamaan regresi seperti pada berikut ini:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DBH + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + e$$

Penjelasan	:
BM	: Belanja Modal
α	: Konstanta
β	: Koefisien regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DBH	: Dana Bagi Hasil
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
e	: error

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Dalam Ghazali (2018:97) yang menyebutkan bahwa uji koefisien determinasi dilaksanakan untuk tujuan pengukuran dan

analisa mengenai partisipasi variabel *independent* atas variabel *dependent*. Kecilnya nilai R^2 memperlihatkan yakni sangat terbatasnya kompetensi variabel *independent* dalam berpengaruh bagi variabel *dependent*. Dengan nilai R^2 yang hampir sama dengan 1 (satu) mengungkapkan bahwa seluruh variabel *independent* yang dimasukkan hampir berkontribusi penuh dalam menyampaikan informasi guna menjelaskan variabel *dependent*.

Uji Statistik F

Dalam Ghazali (2018:98), memaparkan bahwa pengujian statistik F dilaksanakan guna mengungkapkan apa benar variabel *independent* yang secara bersamaan dilibatkan pada model terdapat adanya pengaruh kepada variabel *dependent*. Besarnya tingkat signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Pedoman yang dijadikan acuan untuk mengetahui hasil pengujian ini yaitu bila angka signifikansi $F < 0,05$, dimana dapat dinyatakan kalau variabel *independent* dengan cara bersamaan atau simultan terdapat pengaruh untuk variabel *dependent*.

Uji Statistik t

Dalam Ghazali (2018:98) yang menyebutkan bahwa uji statistik t merupakan pengujian yang dilakukan guna mengungkapkan apa benar secara parsial variabel *independent* ditemukan adanya pengaruh bagi variabel *dependent*. Besarnya tingkat signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Pedoman yang dijadikan acuan untuk mengetahui hasil pengujian ini yaitu apabila nilai signifikansi yang didapatkan $< 5\%$ atau 0,05, bisa ditarik kesimpulan dengan arti bahwa variabel *independent* dinyatakan berpengaruh bagi variabel *dependent* dalam bentuk parsial. Namun, jika signifikansi yang didapatkan $> 5\%$ atau 0,05, bisa diindikasikan dengan variabel *independent* kepada variabel *dependent* tidak terdapat adanya pengaruh dalam bentuk parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	54,79625909
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		,544
Asymp. Sig. (2-tailed)		,929

Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19

Hasil pengujian normalitas memunculkan besarnya *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,929, bisa disaksikan bila angka itu mengungkapkan nilai diatas 0,05. Sehingga diperoleh perbandingan $0,929 > 0,05$ yang kemudian bisa dinyatakan bahwa terdapat distribusi secara normal pada data penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
PAD	,438	2,284	Tiada masalah Heteroskedastisitas
DBH	,369	2,708	
DAU	,247	4,047	
DAK	,231	4,322	

Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19

Pengujian multikolinearitas mengungkapkan dengan hasil PAD memaparkan angka Tolerance-nya 0,438 serta besarnya angka VIF 2,284. DBH menunjukkan nilai Tolerance-nya 0,369 serta besarnya angka VIF 2,708. DAU menyatakan nilai Tolerance-nya 0,247 dan besarnya angka VIF 4,047. DAK memperlihatkan nilai Tolerance-nya dan besarnya angka VIF 4,322. Seluruh variabel memperlihatkan nilai Tolerance-nya melebihi 0,10 dan didapatkan besarnya angka VIF tidak lebih tinggi dari 10. Dengan karenanya, bisa dikutip sebuah kesimpulan kalau tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	,906	Tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas
PAD	,199	
DBH	,513	
DAU	,901	
DAK	,316	

Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19

Pada pengujian heteroskedastisitas melalui penggunaan metode uji *Glejser* mengungkapkan hasil berupa nilai signifikan pada variabel PAD sejumlah 0,199, DBH sejumlah 0,513, DAU sejumlah 0,901, serta DAK sejumlah 0,316. Seluruh variabel menyimpulkan hasil besarnya angka signifikan lebih tinggi dari 0,05. Kemudian dari itu, mampu diambil kesimpulan kalau tidak diperoleh indikasi mengenai masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,966

Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19

Pengujian autokorelasi menghasilkan besarnya nilai hitung *Durbin Watson* 1,966. Nilai yang telah dihasilkan kemudian dilakukan perbandingan dengan nilai tabel *Durbin Watson* dimana memakai besarnya tingkat signifikansi 5%. Penggunaan sampel yaitu 25 serta jumlah variabel *independent* yaitu 4. Sehingga nilai $n = 25$ dan $k = 4$ yang akan digunakan untuk memperoleh nilai pada tabel *Durbin Watson*. Cara menghitung untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah sebagai berikut:

D	DI	Du	4 – du
1,966	1,038	1,766	4 – 1,766
			2,234

Sumber: Data diolah

Karena besarnya nilai d atau *Durbin Watson* hitung 1,966 dimana lebih tinggi daripada du atau batas atas yakni 1,766 serta tidak melampaui dari $4-du$ yakni 2,234, sehingga didapatkan perbandingan $1,966 < 1,766 < 2,234$. Diperoleh perbandingan $du < d$

< 4 – du, maka bisa diperoleh kesimpulan bahwa model regresi terhindar dari masalah autokorelasi, baik autokorelasi positif ataupun negatif.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	197,087	76,368			2,581	,018
PAD	,214	,076	,710		2,821	,011
DBH	-2,251	1,371	-,450		-1,642	,116
DAU	-,060	,166	-,122		-,364	,720
DAK	,611	,405	,522		1,508	,147

Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19

Melalui persamaan model regresi yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 197,087 dapat diartikan pada saat besarnya variabel PAD, DBH, DAU, serta DAK adalah 0 (Nol), oleh karena itu besarnya nilai Belanja Modal yaitu 197,087. Variabel PAD memperlihatkan hasil koefisien regresi positif sebesar 0,214 yang memiliki arti jika terdapat peningkatan PAD senilai 1 satuan, maka selaras dengan Belanja Modal yang juga akan meningkat senilai 0,214 satuan. Variabel DBH dengan koefisien regresi negatif sebesar -2,251 sehingga apabila DBH mengalami peningkatan senilai 1 satuan, maka Belanja Modal akan menurun senilai 2,251 satuan. Variabel DAU dengan besarnya koefisien regresi negatif senilai -0,060 dimana apabila DAU terjadi penambahan senilai 1 satuan, akan menyebabkan nilai Belanja Modal turun senilai 0,060 satuan. Variabel DAK memperlihatkan besarnya koefisien regresi positif senilai 0,611 menunjukkan apabila DAK terjadi peningkatan senilai 1 satuan, maka akan berefek pada Belanja Modal dimana terjadi kenaikan senilai 0,611 satuan.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,667 ^a	,445	,335	60,02629

Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19

Hasil lewat uji koefisien determinasi mengungkapkan *Adjusted R Square* senilai 0,335. Oleh karena itu, ditunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yakni 0,335 atau direpresentasikan dengan 33,5%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi dari PAD, DBH, DAU, DAK bagi Belanja Modal yaitu senilai 33,5% sedangkan terdapat sisa senilai 66,5% yang diuraikan atau dipengaruhi dengan variabel lainnya dimana tidak diikutsertakan kedalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	57880,133	4	14470,033	4,016	,015 ^a
Residual	72063,12	20	3603,156		
Total	129943,25	24			

Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19

Uji statistik F mendapatkan hasil berupa nilai Fhitung sebesar 4,016. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,015 dimana angka tersebut menunjukkan nilai dibawah 0,05. Oleh karena itu didapatkan persamaan $0,015 < 0,05$. Melalui hasil pengujian, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel PAD, DBH, DAU, serta DAK mempengaruhi Belanja Modal dengan bersama-sama atau simultan.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	197,087	76,368			2,581	,018
PAD	,214	,076	,710		2,821	,011
DBH	-2,251	1,371	-,450		-1,642	,116
DAU	-,060	,166	-,122		-,364	,720
DAK	,611	,405	,522		1,508	,147

Sumber: Hasil olah data melalui SPSS19

Pembahasan

1. Hasil melalui pengujian statistik t mengungkapkan kalau PAD menghasilkan t hitung sejumlah 2,821 dan nilai signifikansi 0,011. Dimana angka signifikansinya tidak memperlihatkan lebih tinggi dari 0,05, dengan demikian diperoleh perbandingan $0,011 < 0,05$. Pengujian tersebut menyatakan menolak H_0 dan menerima H_1 , oleh sebabnya bisa diambil kesimpulan yaitu berpengaruh. Arah hubungan positif memperlihatkan kalau semakin banyak penerimaan PAD, yang berarti bakal berdampak dimana pada Belanja Modal juga mengalami sebuah peningkatan. Hasil penelitian ini menyetujui hipotesis dan penelitian Aditiya dan Dirgantari (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat adanya dampak di dalam Pendapatan Asli Daerah kepada Belanja Modal. Tingginya nilai PAD dapat dikatakan sebuah cerminan keberhasilan suatu daerah dalam mencapai kemandirian keuangannya. Hal tersebut terbukti dengan kemampuan pemerintah daerah setempat dalam membiayai pembangunan daerah yang dananya didapatkan dari pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Rendahnya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi keuntungan tersendiri, sebab pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk mengatur segala hal yang menjadi urusan daerahnya, termasuk urusan ekonomi.
2. Kesimpulan dari pengujian statistik t mengungkapkan bahwa DBH menghasilkan besarnya t hitung senilai $-1,642$ dan besarnya nilai signifikansi 0,116. Nilai signifikansi mengungkapkan nilai diatas 0,05, karena itu diperoleh perbandingan $0,116 > 0,05$. Pengujian ini menyatakan menerima H_0 dan menolak H_2 , sehingga bisa dikatakan tidak terdapat pengaruh. Penelitian ini memiliki arah hubungan negatif. Hasil yang dipaparkan dalam penelitian ini berbanding terbalik dengan hipotesis dan penelitian Sudrajat dan

Purniawati (2017) dimana memaparkan bahwa Dana Bagi Hasil kepada Belanja Modal memiliki adanya dampak secara signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut dikarenakan menurunnya aktivitas perekonomian yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Penerimaan Dana Bagi Hasil pada tahun tersebut mengalami penurunan dikarenakan pemerintah pusat memangkas besarnya nilai Dana Bagi Hasil yang diberikan untuk pemerintah daerah. Hanya daerah terpilih yang diberikan jumlah Dana Bagi Hasil secara utuh tanpa adanya potongan. Tidak berpengaruhnya Dana Bagi Hasil bagi Belanja Modal ini bisa menjadi maklum, sebab prioritas pemerintah daerah pada saat ini bukan pada pembangunan infrastruktur. Bencana kesehatan yang sedang dialami saat ini mengakibatkan pemerintah daerah lebih fokus pada belanja dalam bidang kesehatan sebagai upaya untuk penanganan pandemi Covid-19.

3. Hasil melalui pengujian statistik t mengungkapkan bahwa DAU menghasilkan besarnya t hitung senilai $-0,364$ dan besarnya nilai signifikansi 0,147. Nilai signifikansi memperlihatkan nilai diatas 0,05 sehingga diperoleh perbandingan $0,147 > 0,05$. Pengujian ini menyatakan menerima H_0 dan menolak H_3 , sehingga bisa dikatakan tidak terdapat pengaruh. Penelitian ini mempunyai arah hubungan negatif. Hasil yang dipaparkan dalam penelitian ini tidak menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis dan penelitian Dewi (2019) dimana menjelaskan ternyata ditemukan adanya dampak secara positif Dana Alokasi Umum kepada Belanja Modal. Pada penelitian serta pengamatan dimana sudah dilaksanakan saat ini mengungkapkan hasil bahwa DAU yang didapatkan pemerintah daerah diprediksi tidak digunakan dalam pembiayaan Belanja Modal. Kemungkinan difungsikan guna membiayai keperluan lain yang telah menjadi rencana dan prioritas daerah sesuai

dengan tujuannya. Hal tersebut dikarenakan Dana Alokasi Umum mempunyai sifat “*Block Grant*” dimana kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut diserahkan penuh kepada daerah sebagaimana tingkat prioritas kebutuhannya. Penelitian yang

mengungkapkan hasil dimana Dana Alokasi Umum tidak terdapat dampak bagi Belanja Modal, hal itu disebabkan pemerintah pusat telah melakukan pemangkasan setoran Dana Alokasi Umum kepada pemerintah daerah yang disebabkan karena lesunya perekonomian sebagaimana akibat dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sehingga hanya daerah tertentu saja yang mendapatkan Dana Alokasi Umum secara utuh tanpa dikenakan potongan.

4. Hasil melalui uji statistik t mengungkapkan bila pada DAK menghasilkan besarnya t hitung senilai 1,508 dan besarnya nilai signifikansi 0,720. Nilai signifikansi mengungkapkan nilai diatas 0,05 sehingga diperoleh perbandingan $0,720 > 0,05$. Pengujian ini menyatakan menerima H_0 dan menolak H_4 , sehingga bisa dikatakan tidak terdapat pengaruh. Hasil dari penelitian ini tidak sependapat terhadap hipotesis serta penelitian Murti dan Trisnawati (2021) dimana mengungkapkan bahwa terdapat adanya dampak Dana Alokasi Khusus bagi Belanja Modal. Pemda yang nantinya akan mendapatkan DAK dengan jumlah nilai yang tinggi, tidak berarti bahwa dana tersebut akan difungsikan dalam mendanai Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus kemungkinan difungsikan untuk perbantuan dalam membayar pengeluaran-pengeluaran khusus sehubungan dengan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, terjanan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga menyebabkan penurunan jumlah Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan susunan anggaran. Penundaan pekerjaan fisik yang dianggarkan dengan

Dana Alokas Khusus terpaksa dilakukan, sebab dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian mendapatkan hasil bila ternyata Pendapatan Asli Daerah secara parsial mempengaruhi Belanja Modal. Hal tersebut menerangkan bahwa hasil yang dipaparkan dalam penelitian ini menandakan diterimanya hipotesis yang telah diajukan. Dimana semakin membesarnya nilai Pendapatan Asli Daerah, secara otomatis akan berakibat pada semakin besarnya pembangunan dan investasi pemerintah daerah yang dicerminkan lewat kenaikan Belanja Modal. Kemudian dari pada itu, diperoleh juga kesimpulan penelitian yang mengungkapkan bahwa ketiga bentuk dana transfer dari APBN sebagaimana tercermin kedalam dana perimbangan, yang tersusun atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus, dimana melalui hubungan dalam bentuk parsial tidak mempengaruhi Belanja Modal. Hal tersebut menyatakan bahwa hipotesis yang diajukan telah ditolak. Sehingga apabila terjadi peningkatan jumlah ketiga bentuk dana perimbangan tersebut, tidak akan berpengaruh bagi peningkatan nilai Belanja Modal.

Saran

Keterbatasan pada penelitian ini terdapat pada penggunaan jumlah variabel, periode penelitian, objek penelitian, serta sedikitnya jumlah sampel yang digunakan. Saran yang diberikan pada peneliti selanjutnya, dengan keterbatasan yang telah diuraikan maka diminta agar bisa memperbesar jangkauan penelitian dengan memasukkan variabel lain yang kemungkinan dapat mempunyai pengaruh bagi Belanja Modal, seperti Pertumbuhan Ekonomi, Luas Wilayah, Kemiskinan, Pertumbuhan Penduduk, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, juga diharapkan untuk bisa melaksanakan perluasan jumlah sampel penelitian dengan menambah objek penelitian atau melakukan

pembaharuan waktu penelitian dengan memasukkan data yang lebih *up to date* untuk didapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zais, G. M. 2017. Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 140–147.
- [2] Priambudi, W. 2017. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, No.1, Vol.6, 136–147.
- [3] Fatimah, W., 2019, Analisis Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2013-2017, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- [4] Pratiwi, N. A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, No.2, Vol.3, 105–120.
- Yusoff, M, Rahman, S.,A., Mutalib, S., and Mohammed, A. , 2006, Diagnosing Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique, *Journal of Information Technology*, vol 18, hal 152-159.
- [5] Lubis, F., 2015, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Barang Publik terhadap Realisasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan.
- [6] Putri, R. N., 2018, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah, *Skripsi*, Universitas Semarang.
- [7] Dewi, E. P. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2012-2017. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, No.4, Vol.1, 8–26.
- [8] Meltia, Amin, M., dan Hariri. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2018-2019). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, No.2, Vol.10, 36–50.
- [9] Suryani, F., dan Pariani, E. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, No.1, Vol.6, 11–22.
- [10] Putri, A. S., Muchtolifah, dan Sishadiyati. 2021. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, No.2, Vol.3, 85–92.
- [11] Huda, S., dan Sumiati, A. 2019. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, No.1, Vol.14, 85–100.
- [12] Rahman, N. A. A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, No.4, Vol.3.
- [13] Wulandari, P. A. dan Iryanie, E., 2018, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Deepublish, Yogyakarta.
- [14] Firdausy, C. M., 2017, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli*

- Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- [15] Siregar, B., 2015, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual)*, STIM YKPN, Yogyakarta.
- [16] Widjaja, H. A. W., 2009, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [17] Sukarno, A., Hadioetomo, dan Haryadi, A. 2019. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, No.2, Vol.1, 15–32.
- [18] Halim, A., 2016, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- [19] Sumangkut, E. Y., Kindangen, P., dan Walewangko, E. N. 2019. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, No.2, Vol.18.
- [20] Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, Nunung, dan Ayu., 2017, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [21] Patarai, M. I., 2016, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*, De La Macca, Makassar.
- [22] Aditiya, N. Y., dan Dirgantari, N. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, No. 1, Vol.15, 42–56.
- [23] Sudrajat, M. A., dan Purniawati, I. D. 2017. Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, No.1, Vol.1, 56–67.
- [24] Berita Satu. 2020. Dampak Covid-19, PAD DIY Menurun Drastis. <https://www.beritasatu.com/nasional/646081/dampak-covid19-pad-diy-menurun-drastis> diakses tanggal 25 Desember 2021.
- [25] Kumparan. 2021. Pada Wisata, Jogja Bergantung: Mengenal Karakter Ekonomi DIY. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/pada-wisata-jogja-bergantung-mengenal-karakter-ekonomi-diy-1vC3MZmNfUZ> diakses tanggal 13 Januari 2022
- [26] Murti, S., dan Trisnawati, R. 2021. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, No.2, Vol.4, 105–119.
- [27] Darma, Y., Suratman, D., dan Yani, A., 2019, *Analisis Data Statistik: Sebuah Pendekatan Praktis Pengolahan Statistik Bermuatan Karakter*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [28] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Portal Data. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> diakses tanggal 27 Januari 2022
- [29] Sujarweni, V. W., 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- [30] Sugiyono., 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- [31] Ghozali, I., 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [32] Gunawan, C., 2018, *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistic 25)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.